

Tribun Jateng

SPIRIT BAKU WAH

www.tribun.com

Hattrick Cantik Penghapus Kritik

PSIS Semarang mampu merah tiga poln perdana di Liga 1 usal menang telak 4-1 atas PSMS Medan. Minggu (15/4). Striker asing PSIS Bruno Silva sukses menepis kritik dengan mencetak hattrick serta satu assist. Bruno Silva membawa bola di laga ini usal laga untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. (*)

 H.12
TRIBUN
INSIDE


RAYAKAN GOL - Striker PSIS Bruno Silva (kanan) bersama rekannya Hari Nur Yulianto merayakan gol ke gawang PSMS Medan dalam laga Liga 1 di Stadion Moch Soebroto Minggu (15/4).

TRIBUN JATENG/FRANSISUUS ARIEL

 NEWS ANALYSIS YAWANTO, PH.D
KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL UNIP


Kesalahan Administrasi

TEMUAN adanya pemilih ganda sangat memprihatinkan. Database mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan setiap



warga negara punya KTP Elektronik. Dalam konteks tersebut, kemudian harus disisir. Agar jangan sampai pemilih kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya yang

KE HALAMAN 11

Kesalahan Administrasi

DARI HALAMAN 1

disebabkan karena kesalahan administratif seperti ini. Adanya temuan pemilih ganda bukan kali ini saja terjadi. Menurut saya ini bukan persoalan politis melainkan administrasi kependudukan. Sehingga dinas atau instansi terkait di tingkat yang paling bawah itu lah yang pro aktif melakukan pendataan sekaligus verifikasi terhadap ke sahian data kependudukan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab, karena merekalah yang menguasai sekaligus mensuplai data-data kependudukan. Dampak yang timbul jika hal ini ti-

dak segera diselesaikan maka akan menghasilkan pemilu yang bias, tidak adil dan tidak jujur. Selain itu jika dibiarkan, bisa disalahgunakan untuk menggandakan suara. Risikoanya lainnya adalah melanggar hak asasi manusia. Ada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi karena kelalaian pemerintah maka hak mereka tidak bisa terfasilitasi. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah. Karena mungkin juga ada masalah tertentu yang menyebabkan mereka

atau calon pemilih ini tidak terjangkau, seperti misalnya boro, atau masyarakat yang apatis, enggan mencari KTP-EI karena alasan tertentu. Sehingga dalam hal ini semua pihak harus ikut terlibat menyukseskan pemilu. Tapi memang leading sektornya adalah dinas terkait, apakah upaya yang dilakukan sudah maksimal. Tugas berikutnya memastikan data yang ada valid sebelum akhirnya jadi DPT, jangan sampai ada persoalan pemilih ganda semacam ini. Sepanjang sepengetahuan saya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu profesional dan tidak memi-

hak. Terkadang kelainan itu bukan kesengajaan tapi karena belum optimalnya upaya penyusunan database kependudukan. Sehingga jika tidak segera diselesaikan bisa saja dimanfaatkan pasangan calon untuk menggandakan suara. Pilkada yang baik ada pada tiga tataran, meliputi penyelenggara pemilu yang profesional, pasangan calon bersiang jujur, serta pemilih cerdas. Namun dalam kasus ini, secerdas apapun pemilih jika karena kesalahan administrasi mereka tidak bisa memilih maka sangat dirugikan dan melanggar hak asasi. (tim)